KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ada kandungan narkotika, BNN usulkan vape dilarang di Indonesia
Tanggal : Rabu, 15 April 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 2

Ada Kandungan Narkotika

BNN Usulkan Vape Dilarang Di Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta agar peredaran vape atau rokok elektrik dilarang di Indonesia menyusul maraknya temuan kandungan narkotika hingga obat bius dalam cairan *(liquid)* vape di masyarakat.

Usulan ini pun mengundang perbincangan. Ada yang langsung setuju, tapi ada juga yang menilai perlu kajian mendalam, karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan, usulan itu berdasarkan temuan hasil uji laboratorium terhadap ratusan sampel *liquid vape*. Untuk itu, kata dia, BNN berharap agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia.

"Karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi *etomidate*," jelas Suyudi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang Undang Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026).

Suyudi memaparkan, dari hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, terdapat 11 sampel mengandung *synthetic cannabinoid* atau ganja sintetis. Selain itu, lanjut Suyudi, terdapat 23 sampel terbukti mengandung *etomidate* dan satu sampel mengandung methamphetamine alias sabu.

Suyudi menjelaskan, etomidate adalah obat bius yang kini telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan bahwa vape telah disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat berbahaya.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya," jelas Suyudi.

Menanggapi usulan BNN ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil berpendapat, usulan BNN ini perlu dipertimbangkan. Namun, di satu sisi, kata dia, Pemerintah juga harus memikirkan dampak ekonomi, jika vape dilarang.

"Sebenarnya tidak bisa disalahkan vape-nya secara mutlak. Namun, kami harus waspada bahwa bandar narkoba selalu memanfaatkan segala tren," ujar Nasir Djamil saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (12/4/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Rudianto Lallo menyebut usulan BNN melarang vape sebagai hal yang positif. Menurut dia, pelarangan tersebut merupakan upaya pencegahan dini terhadap potensi peredaran narkoba melalui media baru.

"Jika hasil kajian menunjukkan mudaratnya jauh lebih besar, maka ide untuk melarang itu sangat bagus," ujar Rudianto Lallo saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Minggu (12/4/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Muhammad Nasir Djamil dan Rudianto Lallo mengenai usulan BNN agar vape dilarang, berikut wawancaranya.

MUHAMMAD NASIR DJAMIL, Anggota Komisi III DPR

Harus Dipikirkan Juga Dampak Ekonominya



> Posisi negara dalam menghadapi hal ini berbenturan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan publik. Namun, negara harus adil dan tidak boleh membiarkan salah satunya saja.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar ke depannya vape atau rokok elektrik dilarang. Apa tanggapan Anda?

Kami tentunya tidak boleh mengabaikan hasil penelitian BNN ini. Mereka menyampaikan hal tersebut berdasarkan riset nyata, bukan sekadar hipotesis. Oleh karena itu, dalam pembentukan aturan ke depan, kami akan berusaha memasukkan norma-norma baru ke dalam Rancangan Undang Undang agar kekhawatiran BNN ini terakomodasi secara hukum.

Norma-norma seperti apa yang akan dimasukkan dalam RUU Narkotika?

Perlu adanya sinkronisasi karena aturan yang lama sudah ketinggalan zaman, yakni penggabungan antara Undang Undang Narkotika dan Psikotropika. Pasalnya, sekarang banyak zat baru bermunculan, seperti tramadol yang sering disalahgunakan tanpa resep, tetapi belum diatur kuat dalam undang-undang psikotropika. Dengan penggabungan ini, intervensi negara untuk mencegah penyalahgunaan media seperti vape akan lebih terlihat.

Namun, para pengusaha vape tidak setuju jika dilarang. Apa tanggapan Anda?

Sebenarnya tidak bisa disalahkan vape-nya secara mutlak. Namun, kami harus waspada bahwa bandar narkoba selalu memanfaatkan segala tren.

Maksudnya, vape dimanfaatkan sebagai media distribusi narkotika?

Ya, mereka melihat vape sebagai peluang untuk memasukkan narkotika ke dalamnya, dan inilah yang membuat situasinya menjadi sangat dilematis bagi negara.

Mengapa negara harus dilematis?

Posisi negara dalam menghadapi hal ini berbenturan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan publik. Namun, negara harus adil dan tidak boleh membiarkan salah satunya saja. Prinsip pencegahan adalah prioritas utama kami karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kami harus mencari rumusan agar negara mengambil jalan tengah yang moderat, bukan berdiri di tengah jalan yang justru berisiko tertabrak oleh berbagai kepentingan.

Bagaimana dengan nasib para pekerja yang menggantungkan hidup pada produksi vape?

Di situlah pentingnya kerja sama antara institusi pencegahan dengan para pengusaha. Saya akui ini tidak mudah, karena akan dihadapkan pada pilihan sulit antara keberlangsungan ekonomi dan risiko penyalahgunaan zat narkotika. Ini tantangan besar bagi kita semua. ■ NNM

RUDIANTO LALLO, Anggota Komisi III DPR

Jika Mudaratnya Besar, Larangan Vape Tepat



> Pengawasan distribusi cairan *(liquid)* harus diperketat. Setiap produk yang masuk ke pasar harus melalui screening yang jelas, agar tidak ada celah bagi bandar narkoba untuk masuk.

Bagaimana Anda melihat usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang atau memperketat penggunaan vape?

BNN memiliki dasar kuat melalui hasil investigasi mereka yang menemukan adanya indikasi zat narkotika pada varian tertentu. Menurut saya, ini usulan yang positif sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi peredaran narkoba melalui media baru.

Sebenarnya, bagaimana aturan vape di negara lain?

Fakta bahwa negara tetangga sudah melarang bisa menjadi penguat bagi kita. Ini soal kajian manfaat dan mudarat. Jika hasil kajian menunjukkan mudaratnya jauh lebih besar, maka ide untuk melarang itu sangat bagus. BNN adalah pihak yang ditugaskan negara untuk menilai hal ini.

Bagaimana jika ada penolakan dari pengusaha maupun distributor vape?

BNN memiliki tugas untuk menjelaskan secara teknis kepada pengusaha mengenai risiko cairan yang bisa disisipi zat narkotika. Jika pengusaha bisa menjamin peredaran vape mereka bersih dari narkotika, saya rasa itu cukup menjadi pertimbangan.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah terkait vape yang saat ini digandrungi oleh anak muda sebagai alternatif rokok?

Pemerintah berada di posisi dilematis. Jika melarang, ada pihak yang dirugikan secara ekonomi. Namun, jika tidak dilarang, ada potensi besar vape menjadi alat penyebaran narkotika. Ini adalah pilihan yang harus diambil dengan sangat hati-hati.

Apa yang Anda sarankan agar ada jalan keluar bagi pengusaha tanpa mengabaikan aspek keamanan?

Harus ada komunikasi yang intens antara Pemerintah dan pengusaha. Pemerintah perlu mengambil tindakan preventif agar vape tetap boleh beredar, asalkan ada jaminan mutlak bahwa cairan yang dijual sama sekali bukan narkotika.

Apa langkah preventif paling efektif menurut Anda selain sekadar melarang?

Pengawasan distribusi cairan *(liquid)* harus diperketat. Setiap produk yang masuk ke pasar harus melalui screening yang jelas, agar tidak ada celah bagi bandar narkoba untuk menyusupkan barang haram tersebut ke dalam produk vape legal. ■ NNM